

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENENGGELAMAN KAPAL
ASING PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI
UNCLOS 1982**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2020

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENENGGELAMAN KAPAL
ASING PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI
UNCLOS 1982**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP PENENGGELAMAN KAPAL ASING
PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI UNCLOS
1982**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Disusun Oleh :

ANTORO PUJO WIBOWO
15.C1.0024

Semarang, 3 Juni 2020

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

(Benny D. Setianto, SH., L.LM., M.II.)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

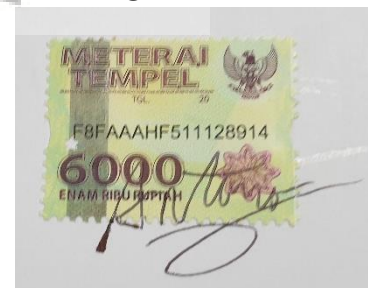
2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI UNCLOS 1982**” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 23 Juni 2020



Antoro Pujo Wibowo

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Antoro Pujo Wibowo

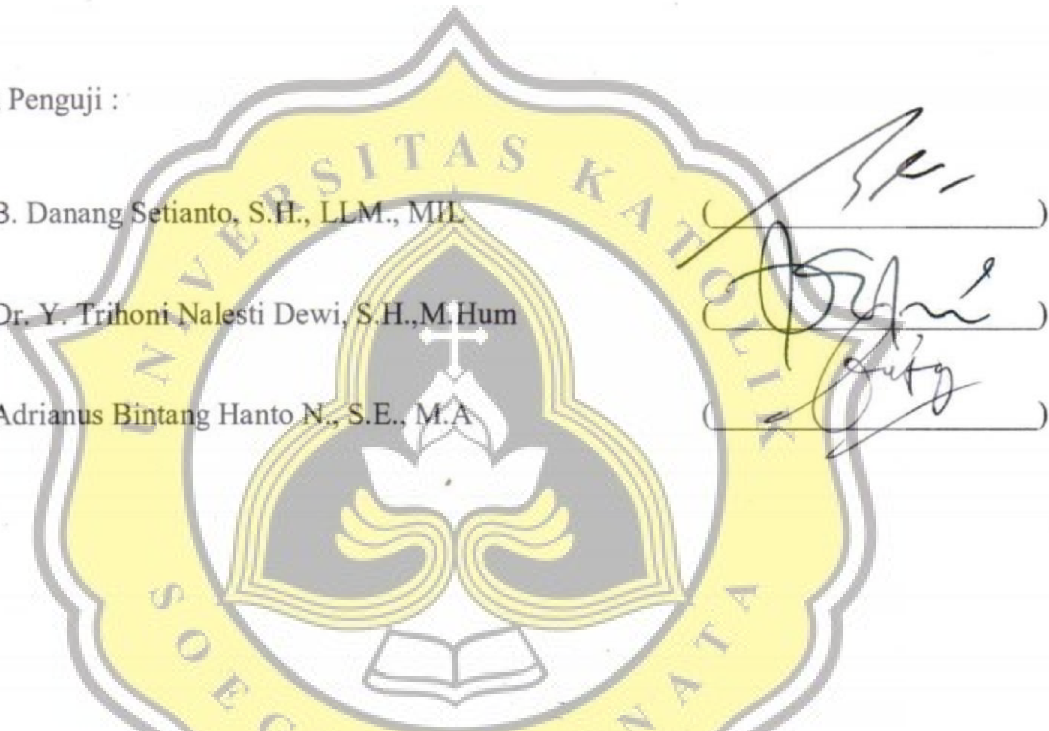
NIM : 15.C1.0024

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 23 Juni 2020

Dosen Penguji :

1. B. Danang Setianto, S.H., LL.M., MH
2. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum
3. Adrianus Bintang Hanto N., S.E., M.A



(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 09 JUL 2020



Marcella E

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Antoro Pujo Wibowo

Program Studi : Hukum dan Komunikasi

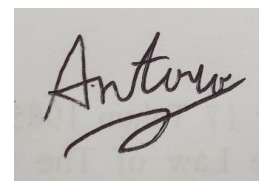
Fakultas : Hukum

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI UNCLOS 1982”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 23 Juni 2020

Yang menyatakan



Antoro Pujo Wibowo

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hadapi masa depan sebagai suatu tantangan bukan rintangan”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orangtua tercinta;
2. Adikku terkasih;
3. Keluarga Besar FHK Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI UNCLOS 1982**”

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bila masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna kebaikan bagi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama ilmu hukum pidana.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini Penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kedua Orangtua;
3. Bapak Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, S.E, S.Kom, MS, IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

4. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
5. Bapak Benny D. Setianto, SH., L.LM., M.IL selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., CN., M.Hum, Dr., selaku Dosen Wali;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah berbagi ilmu dan pengalaman;
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
9. Sahabat seperjuangan selama masa kuliah dan pembuatan skripsi Dovan Saut Parulian Sihombing;
10. Teman-teman tim badminton FHK :Ernest, Juan, Danu, Radin, Fega, Lohita , terimakasih atas kebersamaannya saat masih bersama membela nama FHK di tingkat Fakultas;
11. Teman-teman ku (Timothy, Kevin, Adi, Noel, Evan) yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
12. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Sekali lagi teriring doa dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kelancaran bagi penulisan tugas akhir skripsi ini.

Semoga Tuhan berkenan membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada Penulis.

Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum.



Semarang, 23 Juni 2020

Penulis,

Antoro Pujo Wibowo

ABSTRAK

Illegal Fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi. Bentuk praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang atau tidak sesuai dengan izin. Sehubungan dengan pencegahan *illegal fishing* setiap negara mempunyai tugas pemberantasan *illegal fishing*, tiap negara itu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani masalah ini, satunya Indonesia, pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan menenggelamkan kapal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran pemerintah terkait kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia? dan Bagaimana keterkaitan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan terhadap ekosistem laut di wilayah perairan Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982?

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan-peraturan nasional dan internasional yang terkait dengan perikanan internasional, tindak pidana perikanan dan upaya penegakan hukumnya hasil penelitian dapat diketahui bahwa kriteria *illegal fishing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Upaya penegakan hukum terkait penanggulangan *illegal fishing* di wilayah perairan suatu negara merupakan hak dari negara tersebut yang berdaulat, selagi masih sesuai dengan UNCLOS 1982 yaitu tidak berupa hukuman kurungan/hukuman badan.

Kata Kunci : *Illegal Fishing*, Kebijakan, Ekosistem Laut, UNCLOS 1982.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : Tinjauan Pustaka	15
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan.....	15
1. Pengertian Kebijakan.....	15
2. Pengertian Kebijakan Publik/Pemerintah.....	19
3. Tahap – tahap Kebijakan Publik.....	21
a. Tahap Penyusunan Agenda.....	21
b. Tahap Formulasi Kebijakan.....	21
c. Tahap Adopsi Kebijakan	21
d. Tahap Implementasi Kebijakan	22
e. Tahap Evaluasi Kebijakan.....	22
4. Macam – macam Kebijakan Publik.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perairan Indonesia.....	24

1. Pengertian Tentang Perairan Indonesia.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Illegal Fishing.....	26
1. Pengertian Tentang Illegal Fishing.....	26
2. Ruang Lingkup Illegal Fishing.....	31
3. Bentuk Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia 31	
4. Kerugian Akibat Illegal Fishing	42
5. Dasar – dasar Hukum Pengaturan Illegal Fishing Di Indonesia....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional.....	44
1. Pengertian dan Sumber Hukum Laut Internasional.....	44
A. Pengertian Hukum Laut Internasional	44
B. Sumber Hukum Laut Internasional	46
2. Yurisdiksi Wilayah Perairan Indonesia menurut UU RI nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi <i>United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982</i>	47
3. Zona Eksklusif Ekonomi.	60
BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	68
A. Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing di Perairan Indonesia....	68
1. Peran Pemerintah Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penenggelaman Kapal Asing.....	75
2. Kajian Hukum Nasional dan Internasional terhadap Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing di Wilayah Perairan Indonesia....	78
3. Dampak Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penenggelaman Kapal Asing.....	82
B. Keterkaitan Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan Terhadap Ekosistem Laut di Wilayah Perairan Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982	84
BAB IV : PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101

